**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH UNTUK KEMANDIRIAN
PEREMPUAN DI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Endhita Putri Purba¹, Prayetno²

^{1,2}Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Medan

Alamat e-mail : 1endhitaputri6@gmail.com, 2prayetno@unimed.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of local government policies in empowering small and medium enterprises for women's independence in Cinta Rakyat Village, Percut Sei Tuan District and to determine the efforts of small and medium business actors, especially women, in creating business opportunities in Cinta Rakyat Village, Percut Sei Tuan District. The theoretical concept used in this study is the theory of empowerment which refers to the process of increasing the power of individuals and communities to control resources, influence decisions, and overcome challenges. The methodology used to complete this study is descriptive research with qualitative research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of interview lists and observation sheets. Data analysis uses qualitative data analysis through 3 stages, including data reduction, data presentation, and verification/conclusions. And the results obtained from this study are the implementation of local government policies to support women's SMEs is an important step towards economic independence and gender equality. However, the success of this policy is highly dependent on how these programs are designed and implemented, and how existing challenges are addressed effectively. Stakeholder involvement, ongoing support, and responsive adjustments to field needs are key to achieving desired results. The policies that were made and then implemented have been running properly and the SME actors have also received assistance through programs that have been created by the local government. Overall, the results of the study indicate that policy implementation has a positive impact on the empowerment of women's SMEs, but its success often depends on various factors, including social support, quality of training, and ease of access to resources.

Keywords: Policy, UMKM, Women's Independence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan serta untuk mengetahui upaya pelaku usaha kecil menengah khususnya Perempuan dalam menciptakan peluang usaha di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan. Konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini teori pemberdayaan yang mengacu pada proses meningkatkan kekuatan individu dan komunitas untuk mengontrol sumber daya, mempengaruhi keputusan, dan mengatasi tantangan. Metodologis yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data

berupa lembar daftar wawancara dan lembar observasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif melalui 3 tahapan, antara lain reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung UKM perempuan adalah langkah penting menuju kemandirian ekonomi dan kesetaraan gender. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada bagaimana program-program tersebut dirancang dan dilaksanakan, serta bagaimana tantangan-tantangan yang ada diatasi secara efektif. Keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan berkelanjutan, dan penyesuaian yang responsif terhadap kebutuhan lapangan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan yang di buat kemudian diimplementasikan sudah berjalan dengan semestinya dan para pelaku UKM juga mendapatkan bantuan-bantuan melalui program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan UKM perempuan, namun keberhasilannya sering bergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan sosial, kualitas pelatihan, dan kemudahan akses sumber daya.

Kata Kunci: Kebijakan, UMKM, Kemandirian Perempuan

A. Pendahuluan

Semenjak bergulirnya reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan Pembangunan secara lebih adil dan berkembang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PP ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada tanggal 2 Februari 2021. PP ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada tahun 2014 sumbangsi jumlah UMKM di Sumatera Utara sebanyak 13.986 atau sebanyak 19 penambahan jumlah unit. Pada tahun

2015 mengalami penambahan jumlah unit sebanyak 11 (sebelas) unit sehingga menjadi 13.997 unit. Pada tahun 2016 penambahan jumlah unit cukup meningkat sebesar 1.472 unit sehingga menjadi 15.469 unit. Dan pada tahun 2017 penambahan jumlah unit UMKM cukup signifikan sebesar 9.589 unit sehingga pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 25.058 unit UMKM. Pada tahun 2021 jumlah UMKM di Sumut yang terdata dari Portal Satu Data BAPPENAS sebanyak 1.712.091 yang terdiri dari usaha skala mikro 68%, kecil 18% dan menengah 13%. Pada tahun 2013 jumlah UMKM sebanyak 13.967 unit. (Di Kutip dari Website <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-siapkan-strategi-tingkatkan-kualitas-dayasaingumkm#:~:text=Sementara%20jumlah%20UMKM%20di%20Sumut,18%25%20dan%20menengah%2013%25.>)

Desa cinta rakyat adalah desa dikecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Umumnya suku-suku yang mendiami wilayah Desa Cinta Rakyat mayoritas bersuku bangsa karo. Sedangkan agama mayoritas yang dianut adalah Islam dan Kristen. Kabupaten Deli Serdang

merupakan wilayah di Sumatera Utara yang memiliki luas daerah di bandingkan daerah ini cukup banyak.

UKM yang berada di Desa Cinta Rakyat masih tergolong sedikit sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian yang akan penulis lakukan. Permasalahan-permasalahan UKM di desa tersebut tidak jauh bedanya dengan permasalahan-permasalahan UKM yang ada di tingkat Provinsi maupun Daerah. Permasalahan UKM yang ada di desa tersebut yaitu masih banyak pelaku UKM yang tidak memiliki modal yang cukup serta ketidakpercayaan diri an dalam membangun sebuah usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, serta bagaimana upaya pelaku usaha kecil menengah khususnya Perempuan dalam mengembangkan UKM di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dapat dilakukan dalam sebuah proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivis politis tersebut terlihat dalam

serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan penilaian kebijakan pada suatu program yang dijalankan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat Intelektual. Setelah melawati tahap perumusan masalah, ramalan kebijakan, dan rekomendasi kebijakan, Suatu kebijakan baru dapat diimplementasikan, implementasi kebijakan adalah hal dimana pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan dari program yang tercipta. Kebijakan yang telah disarankan untuk dipilih bukan suatu jaminan bahwa kebijakan tersebut akan dapat berhasil dalam pengimplentasian dilapangan.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, konsep yang telah dikemukakan, ada 4 indikator pemberdayaan, yaitu:

- a. Akses, dalam pengertian untuk kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam menyalah-gunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut agar lebih berdaya.

- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya yang ada tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya yang ada atau pembangunan secara bersama-sama setara satu sama lain (Rahayu, 2016).

Dengan penjelasan di atas maka keahlian yang ada dalam dalam aspek tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk yang dijual oleh sebuah UKM dan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas jangkauan pasar dan menembus pasar baru untuk UKM yang lebih maju (Paramita, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu (Syah, 2010). Dengan demikian, suatu penelitian harus dapat menghasilkan kajian yang

bersifat objektif, sistematis dan logis. Untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, penulis harus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian serta rumusan masalah penelitian, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan “Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Kemandirian Perempuan Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan”.

Subjek penelitian atau informan untuk penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sehingga, dalam melakukan penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Sehingga dalam hal ini informan yang dipilih adalah pihak yang dianggap paling mengetahui mengenai penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dapat mempermudah objek yang diteliti. Adapun yang menjadi Informan penelitian ini adalah Perempuan yang merupakan pemilik usaha UKM berjumlah 5 orang di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Perut Sei Tuan,

Perangkat Desa serta Dinas Koperasi yang berada di Desa tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa lembar daftar wawancara dan lembar observasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif melalui 3 tahapan, antara lain reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Cinta Rakyat memiliki Usaha Kecil Menengah yang beraneka-ragam mulai dari usaha pakaian, bouquet bunga, makanan dan minuman serta usaha sepatu dan sandal yang pemiliknya rata-rata adalah seorang perempuan. Suatu kebijakan ataupun program akan berjalan dan diimplementasikan dengan baik apabila para pemerintah daerah menjalankannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan memerlukan pemantauan serta tahap penilaian yang berguna untuk mengukur sejauh mana kebijakan itu berhasil sesuai dengan tujuannya.

Proses kebijakan UKM di Desa Cinta Rakyat umumnya mencakup efektivitas implementasi kebijakan

dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Kebijakan yang baik harus memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan akses pasar yang memadai. Ultimate goal-nya adalah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UKM untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

Mengenai pemberdayaan UKM di Desa Cinta Rakyat untuk kemandirian perempuan, pemberdayaan perempuan dalam UKM adalah langkah penting untuk mencapai keseimbangan gender dalam dunia usaha dan memaksimalkan potensi ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi secara luas.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM untuk kemandirian perempuan di Desa Cinta Rakyat menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa kebijakan berhasil dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi pelaku UKM perempuan, sementara yang lainnya menghadapi tantangan

dalam implementasi. Kemandirian ekonomi perempuan meningkat, namun terdapat kesenjangan dalam hal pelaksanaan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Keberhasilan program dapat terlihat dari peningkatan keterampilan, akses ke pembiayaan, dan stabilitas usaha. Namun, tantangan seperti koordinasi yang kurang baik dan kebutuhan penyesuaian kebijakan harus diatasi untuk memaksimalkan dampak. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk penyesuaian kebijakan, penambahan dukungan, dan penguatan implementasi untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan tercapai secara optimal.

Perlu adanya penyesuaian dalam strategi kebijakan untuk lebih menargetkan kelompok perempuan yang kurang terlayani atau wilayah yang belum mendapatkan manfaat penuh. Misalnya, program yang lebih spesifik untuk sektor-sektor tertentu yang belum berkembang.

Kebijakan pemerintah daerah telah berhasil mencapai beberapa tujuan jangka pendek seperti peningkatan akses ke modal dan pelatihan bagi perempuan pelaku UKM di Desa Cinta Rakyat. Namun, pencapaian tujuan jangka panjang,

seperti penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pengembangan pasar yang luas, masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kebijakan pemerintah daerah sering kali bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan dukungan khusus kepada UKM yang dikelola oleh perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi kesenjangan gender dalam dunia usaha, dan mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi lokal.

Sumber daya terbatas dalam hal dana atau infrastruktur dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program-program tersebut mendapatkan dukungan yang cukup. Terkadang, program-program tersebut tidak merata dalam distribusinya, terutama jika ada perbedaan akses antara daerah urban dan rural. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dalam kesempatan yang diberikan kepada perempuan pengusaha.

Maka ini sejalan dengan teori yang diberikan oleh T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus

diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pemerintah sudah membuat kebijakan dan berusaha mengimplementasikannya sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuannya walaupun tidak menutup kemungkinan akan banyak kegagalan dalam kebijakan yang dibuat.

Di desa Cinta Rakyat, pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian perempuan dan meningkatkan perekonomian lokal. Mengingat desa ini mungkin memiliki karakteristik unik dan tantangan spesifik, strategi untuk pengembangan UKM di desa ini perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada pemberdayaan perempuan serta pengembangan ekonomi lokal, desa Cinta Rakyat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UKM dan kemandirian ekonomi.

Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Desa Cinta Rakyat yang dikelola oleh perempuan menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pemerintah daerah

karena kontribusi signifikan UKM terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial. UKM seringkali dianggap sebagai tulang punggung ekonomi daerah, terutama di negara berkembang atau wilayah dengan ekonomi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Perempuan pelaku UKM, sebagai kelompok yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses sumber daya dan pasar, memerlukan dukungan khusus untuk memaksimalkan potensi mereka

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UKM perempuan, memperluas akses mereka ke modal, teknologi, dan pasar, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, serta mengurangi kesenjangan gender dalam sektor ekonomi. Yang dimana semestinya harus ada program atau inisiatif yang diberikan seperti program pelatihan keterampilan yang sering kali mencakup keterampilan teknis yang relevan dengan industri tertentu, seperti keterampilan produksi, pengolahan, dan teknologi informasi. Misalnya, pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak manajemen bisnis atau teknik produksi yang efisien.

Selain itu, akses pasar juga mejadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan menyediakan platform bagi UKM di Desa Cinta Rakyat khususnya perempuan untuk memamerkan produk mereka di pameran dan expo lokal maupun internasional, yang dapat membantu mereka menjangkau pelanggan baru dan mitra bisnis. Serta program yang membantu membangun jaringan bisnis, seperti forum bisnis atau kelompok usaha, memungkinkan pelaku UKM untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya.

Mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM di Desa Cinta Rakyat untuk kemandirian perempuan mencakup berbagai aspek yang krusial. Dari analisis dampak jangka panjang hingga strategi pendanaan baru dan regulasi yang mendukung, kebijakan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang dikelola oleh perempuan. Pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif akan mendukung kemandirian ekonomi perempuan secara lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Selain itu implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM di Desa Cinta Rakyat untuk kemandirian perempuan juga memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Dari perencanaan dan desain kebijakan hingga pelaksanaan, pengawasan, dan penyesuaian, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, penerapan program yang relevan, dan penyesuaian berbasis data, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu indikator yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan yaitu evaluasi, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membuka forum diskusi dan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat mengenai pengalaman mereka dan tantangan yang dihadapi. Sehingga tidak hanya mengandalkan dari apa yang mereka sampaikan pada saat musyawarah

desa, namun bisa membuka forum diskusi rutin.

Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan UKM di Desa Cinta Rakyat yang dimiliki oleh perempuan, sehingga berkontribusi pada kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Sehingga usaha kecil menengah yang sedang berjalan tidak hanya dalam batas waktu yang singkat namun bisa berkembang dalam jangka waktu yang lama, mengingat setiap tahunnya angka pengangguran semakin bertambah dan UKM merupakan salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran serta memberikan manfaat kemandirian bagi yang melakukannya terutama perempuan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan kesulitan para pelaku UKM di Desa Cinta Rakyat terhadap informasi program yang ada, maka strategi komunikasi yang dapat dijalin antara pemerintah dengan para pelaku UKM yaitu dengan pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pemberdayaan, termasuk cara

mengakses bantuan, kriteria kelayakan, dan proses aplikasi. Menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, website, dan pusat informasi lokal, untuk menyebarluaskan informasi dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

Dengan memperhatikan hal-hal sekecil ini, kebijakan pemberdayaan UKM perempuan di Desa Cinta Rakyat dapat diimplementasikan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

Kemandirian perempuan dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kunci untuk memberdayakan perempuan dan memajukan ekonomi secara keseluruhan. Mengembangkan kemandirian perempuan dalam konteks UKM melibatkan berbagai strategi yang mencakup pengembangan kapasitas, akses ke sumber daya, serta penghapusan hambatan yang menghalangi perempuan untuk berhasil dalam dunia bisnis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah

Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Kemandirian Perempuan Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan diperoleh kesimpulan bahwa: pemerintah daerah sudah membuat berbagai macam kebijakan untuk memberdayakan perempuan pada UKM ini, yang pertama adalah melalui implementasi kebijakan program, identifikasi kebijakan, keberlanjutan program, pemantauan keberhasilan program, dan evaluasi program. Kemudian dari aspek pemberdayaan perempuan dilihat melalui akses atau kebebasan perempuan dalam membuka peluang usaha kecil menengah, partisipasi atau keikutsertaan perempuan, kontrol atau pengawasan program, serta manfaat dan hasil dari kebijakan yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang sesungguhnya telah optimal dalam menerapkan kebijakan terkait dengan optimalisasi UKM pada penglibatan perempuan.

Pemerintah daerah dalam mendukung UKM perempuan adalah langkah penting menuju kemandirian ekonomi dan kesetaraan gender. Namun, keberhasilan kebijakan ini

sangat tergantung pada bagaimana program-program tersebut dirancang dan dilaksanakan, serta bagaimana tantangan-tantangan yang ada diatasi secara efektif. Keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan berkelanjutan, dan penyesuaian yang responsif terhadap kebutuhan lapangan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan yang di buat kemudian diimplemntasikan sudah sesuai berjalan dengan semestinya dan para pelaku UKM juga mendapatkan bantuan-bantuan melalui program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Tidak adanya perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam berwirausaha juga sudah merupakan pemberdayaan bagi perempuan agar bisa mandiri dan membantu kebutuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basrowi & Suwandi. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2001). *Metode penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Press.

- Creswell. J. W. (1994). *Research design qualitative & quantitative approaches*. Sage
- Daliman, A. (2014). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications, Inc.
- Dipta, I Wayan. (2009). *Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha dalam mengatasi Pengangguran*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- Drs. AG. Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fitrah & Lutfiyuh. (2017). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, Tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak Publisher.
- Frankel. J. R. & Wallen. N. E. (1998). *How to design and evaluate research in education* (Second Edition). Mc. Graw Hill Inc.
- Metaphysik*, translate by Ralph Manheim). Anchor Book
- Neuman. W. L. (2006). *Sosial research method: qualitative and quantitative approaches*. (Third Edition). USA.
- Raco, J., R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo
- Sarmanu. (2017). *Dasar metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan statistik*. Airlangga University Press.
- Seidman, I. (2006). *Interviewing as qualitative research*. Teachers College.
- Setiawan, J., & Anggito, A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak Publisher.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. CV Nata Karya.
- Silverman, D. (1997). *Qualitative research. Theory, method and practice*. Sage Pub, Inc.
- Sjaifudian, Hetifah. (1995) *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akatiga
- Sugiarti, Andalas, E., F., & Setiawan, A. (2020). *Desain penelitian kualitatif sastra*. UMM Press.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: skripsi dan tesis*. Suaka Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Jurnal :**
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Barrett, D., & Twycross, A. (2018). *Data collection in qualitative research*. *Evidence-Based Nursing*, 21 (3), 63-64. <http://dx.doi.org/10.1136/eb-2018-102939>.
- Baxter, J., A., & Chua W., F. (1998). "Doing field research: practice and meta-theory in counterpoints." *Journal of Management Accounting*

- Research, 10, 69-87.
<https://ssrn.com/abstract=137273>.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13 (4), 544-559. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf>.
- Chariri, A. (2009). "Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif", Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Dewi, A. I. K. (2019). Pengaruh Pelatihan Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Flamboyan Malang). *Universitas Brawijaya*, 53(9), 1689-1699.
- Dianingtyas, Murtanti, Putri. (2016). "Peran Perempuan dalam Pembentukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang Berkualitas menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie*.
- Djabbar, I., & Baso, S. (2019). Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) Di Kabupaten Kolaka Utara. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 116-129. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2974>
- Elizabeth, Roosganda. (2007). Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan. Bogor. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).
- Marthalina, M. (2018). Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 3(1), 43-57. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDP/P/article/view/862>
- Paramita, K. (2021). *Analisis Pendapatan Pada Warung Tegal 2000 di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi Utara* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Prahesti, M. R. (2013). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)(Studi Kasus Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Putri, S. A. E. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Kemandirian Perempuan (Studi

- Kasus Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di DKI Jakarta. Skripsi. FISIP Universitas Brawijaya
- Rahayu, P. P. (2016). Program Pemberdayaan Perempuan Dan Motivasi Berwirausaha Wanita Tani. *E-Journal UNESA, Nomor Tahu*.
- Rahmana, A. (2009). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan daya saing usaha kecil menengah. *Seminar Teknologi Informasi*. Yogyakarta.
- Ratnawati, Susi. 2011. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan kewirausahaan ISSN. 1978-4724 *Jurnal Kewirausahaan* Volume 5 Nomor 2, Desember
- Ramberg, Bjørn and Gjesdal, Kristin. (2014). "Hermeneutics", Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/hermeneutic/s/>.
- Rijali, A. (2018). *Analisis data kualitatif*. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 33-45. <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Setyari, Ni Putu Wiwin. "Dinamika Pengembangan UKM di Indonesia", (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses 3 Maret 2013).
- Sriyana, Jaka. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul". (http://dppm.uui.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UUI_09_79-103_STRATEGI_PENGEMBANGAN_USAHA_KECIL_DAN_MENENGAH_%28UKM%29.pdf, diakses 3 Maret 2013).
- Wahyono, Budi. "Kebijakan Pemerintah terhadap UKM". (<http://pend-ekonomi.blogspot.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html>, diakses 4 Maret 2013)
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Orahili Tumori. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1410-1416.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Situs/Website

Jakarta. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portals/id/berita/lainnya/opini/4133->

[umkm-hebat.-perekonomian-
nasional-meningkat.html](#)

Jakarta. Direktorat Utama Pembinaan
dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2021).